

Fungsi pengawasan pada intinya merupakan wewenang DPRD yang kemudian dilakukan oleh anggota DPRD dalam wadah berupa komisi atau panitia khusus. Implementasinya sudah dilegalkan dan diatur dalam Pasal 5. Lebih jauh lagi, apabila komisi atau panitia khusus membutuhkan kolaborasi dari instansi lain, maka diperbolehkan dilakukan kerja sama.

Praktik pengawasan pemerintahan yang menjadi fungsi dari DPRD, termaktub dalam Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2015. Lebih rinci lagi, pada Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pasal-Pasal khusus yang mengulas 10 bahasan utama.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Dokumen

- Ahmed, Mughees., dkk. 2016. *Analysis of Democratic Constitutional Monarchy: A Case Study of Political System of Malaysia*, hal 77. Dalam *Asia Pacific Research Journal Vol. 34*.
- Alamsyah, Bunyamin. 2010. *Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Ringkasan disertasi, hlm 24. Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII).
- Asmawi. 2014. *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah*, hlm 7, dalam *Jurnal Cita Hukum Vol. I No. 1*.
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm 34. Jakarta:..Bhuana Ilmu Populer.

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, hlm 28. Jakarta: Sinar Grafika.
- Boukars, Anouar. 2010. *Politics in Morocco: Executive Monarchy and Enlightened Authoritarianism*, hlm 42. Abingdon: Routledge.
- Bunbongkarn, Suchit. 2010. *Democracy and Monarchy in Thailand dalam Monarchy and Democracy in the 21st Century*, hlm 57. Bhutan: Bhutan Centre for Media and Democracy.
- Budiyono. 2013. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah dalam Rangka mewujudkan Good Governance, hlm 4. Dalam *Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 Nomor 1*.
- CEPP UI. 2015. *Mengenal Lebih Dekat Parlemen Belanda*. Jurnal Parlemen edisi 122, TH.XLV. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Cipto, Bambang. 1995. *Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan Modern Industrial*, hlm 10-14. Jakarta: Rajawali Press.
- Dickerson, Mark O., dan Flanagan, Thomas. 1998. *An Introduction to Government and Politics A Conceptual Approach*, hlm 27. Ontario: Nelson Canada.
- Fatmawati. 2010. *Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistem Multikameral; Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Beberapa Negara*, hlm 214-218. Jakarta: UI Press.
- Fitriyah. 2010. Posisi DPRD Dalam UU No. 32 Tahun 2004, hlm 2 dalam *Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 1, No 1*.
- H.R., Ridwan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*, hlm 247. Jakarta: Rajawali Pers.
- Handley, Paul. 2008. *Princes, Politicians, Bureaucrats, Generals: The Evolutions of the Privy Council under the Constitutional Monarchy*, disampaikan pada *10th International Conference on Thai Studies*. Bangkok: Thammasat University.
- Huda, Ni'matul. 2001. Otonomi Luas (Perspektif Yuridis Dan Politis), hlm 86 dalam *Jurnal Millah Vol.1.No.Agustus*.
- Huda, Ni'matul. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*, cetakan III, hlm 83. Bandung: Nusa Media.

- Isra, Saldi. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi; Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Cetakan I, hlm 82. Jakarta: Rajawali Pers.
- Iver, Mac. 1988. *The Modern State*, Cetakan Kedua, Alih Bahasa Moertono, hlm 314-315. Jakarta: Aksara Baru.
- Jaweng, Robet Endi. 2011. Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia, hlm 63. *Jurnal Analisis CSIS Vol.40(2)*.
- Joeniarto. 1984. *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, hlm 22. Jakarta: Bina Aksara.
- Karim, Muhammad Qur'anul. 2018. Tesis *Analisis Fungsi Pengawasan DPRD DIY terhadap Pelaksanaan Rekomendasi UUK DIY*, hlm 74. Yogyakarta: Magister Ilmu Pemerintahan UMY.
- Kantorowicz, Ernst H. 2016, *The King's Two Bodies*. Princeton University Press.
- Kristiono, Natal., 2015. *Buku Ajar Otonomi Daerah*, hlm 114. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Kuhn, Thomas. 2000. *The Structure of Scientific Revolution*, Edisi Bahasa Indonesia. Bandung: Remaja Rosda Karya.; Wilardjo, Liek. 1990. *Realita dan Desiderata*. Yogyakarta: Duta Waca University Press.; serta Kleden, Ignas. 1987. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, hal 20. Jakarta: LP3ES.
- Kumolo, Tjahjo., dkk. 2017. *Nawa Cita untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah*, hlm 17. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Kusuma, Mahmud. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, hlm 31. Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama dengan LSHP.
- Lijphart, Arend. 1999. *Patterns of Democracy; Government Froms Perfomance in Thirty-Six Countries*, hlm 211. New Haven and London: Yale University.
- M.D., Mahfud. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, hlm 260. Yogyakarta: Gama Media.
- M.D., Mahfud. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*, hlm 368. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mackenzie, G. Calvin. 1986. *American Government: Politic and public policy*, hlm 120-137. New York: Random House New York.

- Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, hlm 137. Yogyakarta: Pusham UII.
- Marbun, S.F., dkk. 2001. *Dalam Dimensi-dimensi Hukum Administrasi Negara*, hlm 34. Yogyakarta: UII Press.
- Mas, Marwan. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm 129. Jakarta: Ghalia Indonesia..
- Mas'oe'd, Mochtar., & MacAndrews, Colin (ed). 1981. *Perbandingan Sistem Politik*, hlm 144. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Materay, Korneles. *Perbandingan Penerapan Asas Desentralisasi Dalam Politik Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pemerintah Daerah Di Indonesia*, hlm 24-25.
- Merriam Jr., C.E. 2001. *History of the Theory of Sovereignty Since Rousseau*, hlm 7. Ontario: Batoche Books.
- Merriam Jr., C.E. 2001. *History of the Theory of Sovereignty Since Rousseau*, hlm 6. Ontario: Kitchener.
- Mulyosudarmo, Soewoto. 1997. *Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara, ihlm 27*. Jakarta: Gramedia.
- Naipitupulu, Paimin., 2005. *Peran dan Pertanggungjawaban DPR; Kajian di DPRD Propinsi DKI Jakarta*, hlm 38. Bandung: Alumni.
- Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. 2008. *Monograph on Politics and Government*, Vol. 2, No. 1 (1-122). Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM dan Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah.
- Nugroho, Bambang Wahyu. *Upaya Meningkatkan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta*, hlm 4. *Bahan Masukan Bagi Pimpinan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta*, disampaikan melalui Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. 2015.
- Plowden. 1816. *Commentaries or Reports of Edmund Plowden*. London.
- Praptomo. 2016. *Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Di Kabupaten Kutai Kartanegara*, Jurnal Magister Ilmu Hukum, hlm 23-24. Malang: Universitas Brawijaya.
- Pumama, Edy. 2007. *Negara Kedaulatan Rakyat; Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain*, hlm 83. Bandung: Nusa Media dan Imagine Press.



- R, Ibrahim. 2003. *Sistem Pengawasan Konstitusional Antara Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif dalam Pembaruan Undang-Undang Dasar*, hlm 131. Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Unpad.; Mahmuzar. 2010. *Sistem Pemerintahan Indonesia; Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945*, hlm 71. Yogyakarta: Nusamedia..
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, hlm 9. Semarang: Pustaka Pelajar.
- Rohim, Nur. 2013. *Kedudukan Konstitusi Dalam Praktik Ketatanegaraan Saudi Arabia*, Jurnal Tahkim, Vol IX Nomor 2, hlm 95-111. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta.
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma: Penelitian Sosial Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif*, hlm 68-72. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sanit, Arbi. 1985. *Perwakilan Politik di Indonesia*, hlm 46-52. Jakarta: Penerbit CV Rajawali.
- Salim, Amrullah. 1994. *Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, dalam Paulus Effendi Lotulung, Himpunan Makalah, hlm 127-128. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Saragih, Bintan R. 1991. *Peran DPR GR Periode 1965-1971 Dalam Menegakkan Kehidupan Ketatanegaraan yang Konstitusional Berdasarkan UUD 1945*, hlm 41. Bandung: Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjajaran.
- Santoso, H.M. Agus. 2013. *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah Di Indonesia*, cetakan I, hlm 150-151. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sartori, Giovani. 1997. *Comparative Constitutional Engeenering An Inquiry Into Structure, Incentives and Outcomes (2nd ed)*, hlm 184. New York: New York University.
- Sinamo, Nomensen. 2010. *Hukum Administrasi Negara*, hlm 142. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Soemantri, Sri. 2003. Susunan dan Kedudukan DPD, Makalah dalam seminar, "*Kedudukan dan Peranan DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*", hlm 2. Dilaksanakan Sekjen MPR RI dan UNDP di Yogyakarta, 24 Maret 2003.; Gaffar., Jenedjri M. dkk. 2003. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (ed)*, hlm 18. Jakarta: Sekjen MPR RI dan UNDP.
- Solossa, Jacobus Pervidya. *Otonomi Khusus Papua Mengangkat Martabat Rakyat Papua Dalam NKRI*, hlm 54. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Strong, C. F. 1966. *Modern Political Constitution; an Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, hlm 194. London: Sidgwick & Jackson Limited.
- Subbagian Persidangan Sekretariat DPRD DIY. 2018. Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten. Dalam *Dokumen Laporan Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 15 Tahun 2018 Pengawasan Perdais Nomor 1 Tahun 2017*. Yogyakarta: DPRD DIY. Subbagian Persidangan Sekretariat DPRD DIY. 2016. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Program/Kegiatan yang Didanai dengan Dana Keistimewaan. Dalam *Dokumen Bahan Acara Nomor 1 Tahun 2016*. Yogyakarta: DPRD DIY.
- Subbagian Persidangan Sekretariat DPRD DIY. 2017. Hasil Pengawasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam *Dokumen Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: DPRD DIY.
- Sunarno, Siswanto. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, hlm 66. Jakarta: Sinar Grafika.
- Surachman, Winarno. 1973. *Data dan Teknik Research: Pengertian Metodologi Ilmiah*, hlm 27. Bandung: CV Tarsito.
- Suwarno, P.J. 1999. *Tata Negara Baru, Sistem Pemerintahan yang Demokratis dan Konstitusional*, hlm 50. Yogyakarta: Kanisius; Budiardjo, Miriam. 1979. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm 50. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Syafrudin, Ateng. 1994. *Kepala Daerah*, hlm 4. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syaifudun. 2006. *Proses Pembentukan Undang-Undang, Studi tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Era Reformasi*, hlm 153-154. Jakarta: Program Doktor Ilmu Hukum FH UI.
- Syarifin, Pipin., dan Jubaedah, Dedah. 2012. *Ilmu Perundang-undangan*, hlm 66. Bandung: Pustaka Setia.
- Thaib, Dahlan. 2001. DPRD dan Otonomi Daerah (Kajian Dari Sudut Pandang HTN), hlm 82 dalam *Jurnal, Millah Vol.1. Agustus*.
- Thaib, Dahlan. 2002. *Menuju Parlemen Bikameral: Studi Konstitusional Perubahan ke Tiga UUD 1945*, hlm 9, Pidato Pengukuhan Dalam Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum UII. Yogyakarta: UII.

Warsistiono, Sadu. 2001. *Etika Hubungan Legislatif-Eksekutif Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*, diedit oleh Riyadi, Ondo., hlm 112. Bandung: Pusat Kajian Pemerintah STPDN.

Wijk, H.D. van., Konijnenbelt, Willem. 1995. *Hoofdstukken van Administratief Recht*, hlm 41. Vuga's Gravenhage.

World Bank. 1997. *World Development Report - The State Changing World* Washington DC. World Bank.

## Laman Web

Dinas Pendidikan Provinsi Yogyakarta. Pendidikan. Melalui <http://www.pendidikan-diy.go.id>. 2009.

Humas DPRD DIY. Adukan oknum yang mengaku trah HB VII ke DPRD DIY. Melalui <https://www.dprd-diy.go.id/adukan-oknum-yang-mengaku-trah-hb-vii-ke-dprd-diy/>. 2016.

DPRD DIY. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui <https://jdih.dprd-diy.go.id/?cat=8&file=57>. 2015.

Ismiyanto, Agung. Serapan Danais Capai 80 Persen. Melalui <https://jogja.tribunnews.com/2019/03/29/serapan-danais-capai-80-persen.2019>.

Pemerintah Provinsi Yogyakarta. Info Yogyakarta. Melalui <http://dppka.jogjaprov.go.id/document/infoyogyakarta.pdf>. 2019.

Permana, Sukma Indah. Warga Protes Pengkaplingan Sultan Ground oleh Trah Sultan HB VII. Melalui <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3495401/warga-protes-pengkaplingan-sultan-ground-oleh-trah-sultan-hb-vii>. 2017.

Maharani, Shinta. BPS Ungkap Kesenjangan Ekonomi di Yogyakarta Tinggi. Melalui <https://nasional.tempo.co/read/727170/bps-ungkap-kesenjangan-ekonomi-di-yogyakarta-tinggi/full&view=ok>. 2015.

Wikipedia. Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui [http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah\\_Istimewa\\_Yogyakarta](http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta). 2019.

## Produk Hukum

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, & DPRD (UU MD3)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

